

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)
SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Seiring dengan berkembangnya zaman, adanya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat serta didukung pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai aktivitas elektronik, termasuk alat bukti elektronik. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tentang alat bukti rekaman CCTV dalam hukum acara pidana di Indonesia, bagaimana kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian, bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap rekaman CCTV tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta dianalisis secara kualitatif.

Pembuktian mempunyai peranan yang penting dalam proses peradilan pidana di pengadilan. Pro dan kontra alat bukti rekaman *Close Circuit Television* (CCTV) sebagai barang bukti dalam persidangan terjadi perbedaan pendapat di masyarakat, karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan hanya hasil visum yang sah sebagai alat bukti dan dikenal dalam KUHAP yakni alat bukti surat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan tentang alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedudukan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/ PN.Mdn adalah rekaman CCTV digunakan sebagai salah satu bukti pendukung yang diberikan Kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam perkara tersebut untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan untuk memperkuat keterangan saksi dan alat bukti yang lain berupa benda yang telah diambilnya, CCTV memberikan gambaran yang jelas dan terperinci atas terjadinya tindak pidana di lokasi yang dimana keterangan saksi tidak begitu jelas melihat terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, dalam proses acara pidana ini kedudukan CCTV dalam pertimbangan hakim dimasukkan dalam kategori barang bukti yang memberikan petunjuk dan membuat terang suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Disarankan agar diatur dan disusun secara lebih jelas dan tegas alat bukti yang sah diluar KUHAP guna membantu mengungkapkannya suatu kebenaran materiil.

Kata Kunci : Rekaman CCTV, Alat Bukti, Pencurian.

ABSTRACT
JURIDICAL ANALYSIS OF CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)
RECORDINGS AS AN EVIDENCE TOOL FOR THE CRIME
OF THEFT WITH WEIGHTS
(Study Decision Number 5/Pid.B/2022/PN.Mdn)

As time goes by, there is very rapid development of technology and information and is also supported by advances in science, giving birth to new regulations, namely Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, which regulates electronic activities, including electronic evidence. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate CCTV recording evidence in criminal procedural law in Indonesia, what is the position of CCTV recordings as evidence in criminal acts of theft, what is the legal consideration of judges regarding CCTV recordings of criminal acts of theft based on Decision Number 5/Pid.B /2022/PN.Mdn.

Writing this thesis uses library research methods. The nature of this research is descriptive and the approach method used in this research is normative juridical research and analyzed qualitatively.

Evidence has an important role in the criminal justice process in court. Pros and cons of Close Circuit Television (CCTV) recording evidence as evidence in trials, there are differences of opinion in the community, because there were no witnesses who saw the incident directly and only post-mortem results are valid as evidence and are known in the Criminal Procedure Code, namely documentary evidence. .

Based on the research results, it is known that the regulation of electronic evidence in criminal procedural law in Indonesia is regulated in Law Number 11 of 2008 as amended to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The legal status of CCTV recordings as evidence in the crime of theft with aggravation in Decision Number 5/Pid.B/2022/PN.Mdn is that CCTV recordings are used as supporting evidence provided by the Prosecutor's Office to reveal the crime of theft with aggravation. In this case, to reveal the criminal act of theft with aggravation and to strengthen the testimony of witnesses and other evidence in the form of objects that had been taken, CCTV provides a clear and detailed picture of the occurrence of the crime at a location where the witness's statement did not clearly see the defendant committing the act. criminal act, in this criminal procedural process the position of CCTV in the judge's consideration is included in the category of evidence that provides clues and makes clear a criminal act committed by the defendant. It is recommended that legal evidence outside the Criminal Procedure Code be regulated and compiled more clearly and firmly to help reveal material truth..

Keywords: CCTV footage, evidence, theft.